

**PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA MEMBANGUN
(GERDEMA) di DESA PULAU SAPI KECAMATAN
MENTARANG KABUPATEN MALINAU**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh :
TOMI INDRAWAN
13520040**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

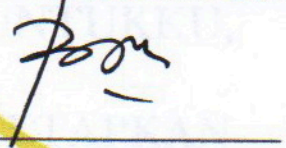
Hari : Rabu,
Tanggal : 18 Oktober 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD ”APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

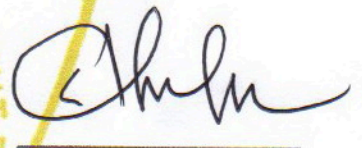
NAMA

TANDA TANGAN

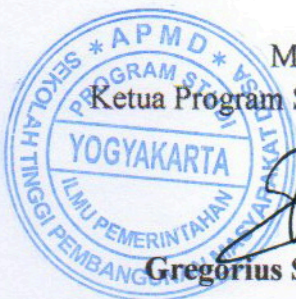
Ir. Muhammad Barori, M.Si
Ketu/Penguji/Prmbimbing



Dr. Supardal, M.Si.
Penguji Samping I



Dra. Sri Utami, M.Si.
Penguji Samping II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

MOTTO

**AKU PERCAYA, BAHWA APAPUN YANG AKU
TERIMA SAAT INI, ADALAH YANG TERBAIK
DARI TUHAN.**

**DAN AKU PERCAYA, DIA AKAN SELALU
MEMBERIKAN YANG TERBAIK UNTUKKU,
PADA WAKTU YANG TELAH IA TETAPKAN**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOMI INDRAWAN

NIM : 13520040

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan

TOMI INDRAWAN

13520040

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan studi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa **"APMD" Yogyakarta**. Atas selesainya penulisan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang selama ini dengan ikhlas hati telah banyak memberi bantuan baik moril maupun material serta dalam rangka kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

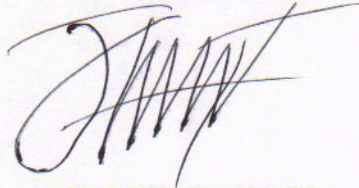
1. Kepada Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD)' 'APMD' ' YOGYAKARTA
2. Kepada Bapak Gregorius Sahdan, S,IP, M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Kepada Ibu Nelly Tiurmida, Ir, MPA Selaku dosen Wali yang Selama 4 tahun ini yang telah membimbing saya dalam Proses Perkuliahan.
4. Kepada Bapak Ir. Muhammad Barori M.SI selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan motifasi kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan perkuliahan di kelas yang pernah peneliti ikuti sejak semester satu hingga semester akhir, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
6. Kepada Bapak, Mama, saudara/ saudari yang tidak pernah bosan untuk menasehati dan menyemangati, selama kuliah dan selama proses pembuatan skripsi.
7. Kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Pulau Sapi secara keseluruhan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, memberikan dukungan, serta bersedia membantu peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.

8. Kepada Robi Charles, Ronal. Yang menyediakan tempat bagi peneliti dan mendukung dan memberi semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberi andil dan harapan serta bantuan langsung atau tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, dan pembaca. Peneliti menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya serta mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta 18 Oktober 2017

Penyusun,



TOMI INDRAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
SINOPSIS.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konsep	6
1. Konsep Pembangunan.....	7
2. Konsep Pembangunan Desa.....	8
3. Konsep Implementasi	10
4. Konsep Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema).....	12
5. Konsep Pelaksanaan program Gerakan Desa Membangun (Gerdema)	13
6. Konsep Program Gerdema dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	16
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Unit Analisis	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Analisa Data.....	23

BAB II PROFIL DESA PULAU SAPI

A. Keadaan Geografis.....	25
B. Keadaan Iklim.....	25
C. Keadaan Kependudukan.....	25

D. Keadaan Ekonomi	28
E. Kadaan Sarana dan Prasarana.....	29
F. Visi dan Misi Pemerintah Desa	31
G. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	32
H. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Informan.....	39
1. Diskripsi Informan Menurut Usia.....	40
2. Diskripsi Informan Menurut Pekerjaan	40
3. Diskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin.....	41
4. Diskripsi Informan Menurut Jenis Pendidikan.....	42
B. Analisis Hasil Wawancara.....	43
1. Perencanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau	43
2. Penganggaran Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau	51
3. Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di desa Pulau kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau	55
4. Pelaporan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di Desa Pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.....	63
5. Evaluasi Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau	64

BAB 1V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

INTISARI

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai strategi dan kebijakan yang dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan, salah satunya dengan menggunakan pendekatan desentralisasi yang lebih mengedepankan kemandirian dan keadilan dimana semua rencana dari relisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Sebelum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, Bupati Malinau berinisiatif mengembangkan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sejak tahun 2011 melalui Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) yang menargetkan semua desa yang berada di Kabupaten Malinau, menjadi desa mandiri.

Sehubungan dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema), di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau**, dengan tujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan program tersebut serta kendala yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk memaparkan atau mendiskripsikan beberapa hal menyangkut masalah yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dengan penentuan sampel menggunakan teknik *puposive*, artinya narasumber akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan

Dari hasil penelitian dapat diketahui, program Gerdema sudah dilaksanakan dengan baik yang dititik beratkan pada 4 bidang utama, meliputi bidang infrastruktur, bidang sumber daya manusia, bidang ekonomi kerakyatan, serta bidang aparatur pemerintahan, walaupun diakui terdapat kendala dalam pelaksanaannya pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Kata kunci: Pelaksanaan - Program Gerdema.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idealnya pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi. Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal periode pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Dalam otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah

tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi desa. Desa juga secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil. Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten/ kota, tetapi juga desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Idealnya pembangunan desa memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana masyarakat dapat hidup dengan tenang tanpa ada rasa takut baik karena adanya tindakan kriminal maupun tekanan dari pihak manapun sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja dengan baik, normal dan wajar sehingga dapat menciptakan keadaan yang sehat, sejuk bersih dan menyenangkan karena didukung oleh suasana lingkungan sosial yang kondusif dalam kehidupan masyarakat majemuk dengan latar belakang suku (sub suku) dan agama dapat hidup berdampingan, saling menghormati, menghargai serta memiliki sifat toleran terhadap warga lainnya.

Pemerintah daerah telah mengakui adanya kewenangan. yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang

mencirikan *bottom up*, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desa lah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan, kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bupati Malinau menyadari kondisi daerahnya sangat tertinggal sehingga berinisiatif mengembangkan proyek yang menyentuh kehidupan langsung masyarakat. Tata nuan sosial di pedalaman yang memperhatikan keselarasan alam, manusia, dan lembaga keagamaan coba diperbaiki serta dioptimalkan kinerjanya.

Minimnya sarana dan prasarana, infrastruktur yang terbatas, kualitas SDM masih rendah dengan kondisi geografis yang sulit sehingga perlu adanya pendekatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera melalui Gerdema.

Konsep pembangunan Gerdema telah diluncurkan oleh Bupati Yansen TP, yang menargetkan semua desa yang berada di Malinau dengan jumlah 106 desa hingga tahun 2016 sudah menjadi desa yang mandiri. Adapun dasar perencanaan program Gerdema mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Malinau ke arah pemberdayaan masyarakat dan untuk menjadikan desa-desa di Kabupaten Malinau menjadi desa yang mandiri pada tahun 2016, dengan otonomi daerah maka sejak awal 2011 Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan pembangunan secara berencana, bertahap dan berkeselimbangan yang perwujudannya melalui “Gerakan Desa Membangun (Gerdema). Pembangunan ini lebih diarahkan pada pembenahan yang dititikberatkan pada empat pilar Pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Daerah
2. Membangun Sumber Daya Manusia
3. Membangun Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Kerakyatan
4. Membangun Sektor Pemerintahan

Dengan adanya program tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau meyakini bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih maju dan masyarakatnya akan lebih sejahtera dibandingkan dengan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti bermaksud untuk mengangkat penelitian pada salah satu desa di Kabupaten Malinau yakni Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang.

Desa Pulau Sapi merupakan barometer untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Mentarang serta desa ini juga merupakan desa yang jauh lebih tua dibandingkan dengan desa-desa lainnya, ditambah masyarakat yang ada di desa sekitar. Desa Pulau Sapi sering melakukan studi banding untuk melihat perkembangan pada beberapa desa di Povinsi Jawa Tengah, sehingga dampak positif yang ditemukan dari studi banding tersebut, dapat diterapkan di desanya.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah, bagaimana pelaksanaan program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua hal antara lain:

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Beratha, I Nyoman. 1981. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah*. Tarsito. Bandung.
- Rahardjo, Dawan. 1978. *Seminar Nasional Pembangunan Desa Makalah Prasarana* Yayasan Filsafat. Universitas Gadjah Mada.
- Ndaraha, Talizuduhu. 1980. *Hubungan Antara Partisipasi dan Hasil-Hasil Pembangunan* Yayasan Karya Darma II P. Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah :Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi. Aksara. Wiludjeng,
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Dwijowijoto. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.ELEX Media Komputindo.
- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijkasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.
- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*

- Wahab. Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung.
- Nawawi, Hadiri, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit : Fakultas Psikologi, Yogyakarta.
- Yansen, TP. 2013. *Gerakan Desa Membangun. Sebuah Ide Inovatif tentang Pembangunan Desa*. Malang: PT. Danar Wijaya

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional